

**PERAN MANAJEMEN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU  
PELAYANAN PENDIDIKAN DI MI MA'ARIF 1 BUMI MULYA DAN MIN 1 WAY  
KANAN**

Nurhasanah<sup>1</sup>, Jamal Fakhri<sup>2</sup>, Romlah<sup>3</sup>

Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Raden Intan  
Lampung

[nurhasanahbaru2810@gmail.com](mailto:nurhasanahbaru2810@gmail.com)<sup>1</sup> [jamal\\_fakhri@yahoo.com](mailto:jamal_fakhri@yahoo.com)<sup>2</sup>  
[romlah@radenintan.ac.id](mailto:romlah@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The quality of educational services is one of the main indicators of the success of educational institutions, including madrasahs, in carrying out their functions as providers of formal education based on Islamic values. In the context of educational decentralization and the implementation of madrasah-based management, the Madrasah Committee has a strategic role as a working partner that supports the achievement of educational goals through involvement in the planning, implementation, evaluation, and supervision of educational programs. This study aims to comprehensively examine how the role of the Madrasah Committee management can contribute to improving the quality of educational services in two Islamic elementary educational institutions, namely MI Ma'arif 1 Bumi Mulya and MIN 1 Way Kanan, which are located in Way Kanan Regency, Lampung Province. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The results of the study indicate that the Madrasah Committee in both madrasahs has a significant role in supporting the improvement of the quality of education services. These roles include the function of providing consideration in strategic decision-making, mobilizing financial and non-financial support, liaison between the madrasah and parents/guardians of students, and as a supervisory body for the implementation of learning activities. Supporting factors for the success of the committee's role include good communication between the madrasah and the committee, high commitment from the committee administrators, and the openness of the madrasah in involving the committee in various aspects of policy. However, there are still obstacles such as budget constraints, lack of management training for committee members, and minimal active participation of some members. This study recommends ongoing training and coaching for Madrasah Committee members as well as more supportive policies from local governments and the Ministry of Religion to strengthen the institutional role of the committee in the madrasah education system. With good management, the madrasah committee can become a major actor in encouraging the transformation of the quality of education services based on community participation.*

**Keywords:** *Madrasah Committee Management, Quality Of Education Services.*

## **ABSTRAK**

*Mutu pelayanan pendidikan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan institusi pendidikan, termasuk madrasah, dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan formal berbasis nilai-nilai keislaman. Dalam konteks desentralisasi pendidikan dan implementasi manajemen berbasis madrasah, Komite Madrasah memiliki peran strategis sebagai mitra kerja yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan program-program pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana peran manajemen Komite Madrasah dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di dua lembaga pendidikan dasar Islam, yaitu MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan, yang berada di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Madrasah di kedua madrasah memiliki peran signifikan dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Peran tersebut meliputi fungsi sebagai pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, penggalangan dukungan finansial dan non-finansial, penghubung antara madrasah dan orang tua/wali murid, serta sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Faktor pendukung keberhasilan peran komite antara lain adalah adanya komunikasi yang baik antara pihak madrasah dan komite, komitmen tinggi dari pengurus komite, serta keterbukaan pihak madrasah dalam melibatkan komite dalam berbagai aspek kebijakan. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan manajemen bagi anggota komite, dan minimnya partisipasi aktif sebagian anggota. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi anggota Komite Madrasah serta kebijakan yang lebih mendukung dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk menguatkan peran kelembagaan komite dalam sistem pendidikan madrasah. Dengan manajemen yang baik, komite madrasah dapat menjadi aktor utama dalam mendorong transformasi mutu layanan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat.*

**Kata kunci :** *Manajemen Komite Madrasah, Mutu Layanan Pendidikan*

### **A. Pendahuluan**

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan

berbasis madrasah. Mutu tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses pendidikan, mulai dari input, proses, hingga output dan outcome yang

dihasilkan.(Rismawati et al., 2024)  
Salah satu aspek penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan adalah keberadaan dan fungsi Komite Madrasah, yang bertindak sebagai mitra madrasah dalam merumuskan kebijakan, mengawal implementasi program, serta mendukung pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel.(Hikmawati, 2024)

Di dalam paradigma Tripusat pendidikan. Selain Madrasah, peran keluarga dan masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Keterlibatan stakeholder pendidikan tadi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpengaruh terhadap mutu pendidikan.(Suryadi & Mushlih, 2019)  
Keterlibatan masyarakat seperti dukungan dana, pemikiran, pengelolaan, jasa dan lain-lain. Keterlibatan peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan dibentuk di setiap Kabupaten atau Kota, sedangkan Komite Sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat posisi mereka agar

mampu dan mau secara aktif berpartisipasi, dalam setiap program dan kegiatan pengupayaan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan madrasah. Upaya ini harus dilakukan melalui kerjasama yang kuat antara Komite Madrasah untuk bersama-sama menggali potensi diri sesuai peran masing-masing dengan prinsip musyawarah demi tujuan bersama sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا  
الْقَلْبِ

لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemahlembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal*

*kepada-Nya (Surat Ali Imron Ayat 159)*

Komite Madrasah merupakan lembaga representatif dari masyarakat yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan untuk menampung aspirasi, memberikan dukungan, serta melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan. Keberadaan komite ini selaras dengan kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.(Sayuti, 2022) Dalam konteks madrasah, yang berada di bawah binaan Kementerian Agama, pelibatan masyarakat melalui Komite Madrasah menjadi sangat penting, terutama untuk menjamin keberlangsungan program-program pendidikan Islam yang kontekstual, partisipatif, dan berdaya saing.

Namun demikian, implementasi peran Komite Madrasah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak komite yang belum memahami secara utuh tugas dan fungsinya, terbatasnya kapasitas manajerial, kurangnya pelatihan, serta

dominasi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan menyebabkan komite berjalan secara formalitas.(Ramadana, 2021) Hal ini berdampak pada tidak optimalnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. Di sisi lain, keberhasilan beberapa madrasah dalam membangun relasi yang harmonis dan sinergis dengan komite membuktikan bahwa ketika dikelola dengan baik, Komite Madrasah mampu menjadi motor penggerak perubahan positif dalam pengelolaan pendidikan.(Anwar, 2022)

Studi pendahuluan yang dilakukan di MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan menunjukkan bahwa komite di dua madrasah ini telah berkontribusi aktif dalam mendukung program pendidikan melalui berbagai kegiatan seperti penggalangan dana, pengawasan program, dukungan kegiatan keagamaan, dan pelibatan dalam perencanaan strategis. Namun, efektivitas peran tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi dan terukur secara sistematis, sehingga diperlukan kajian akademik yang mampu mengeksplorasi lebih dalam tentang bentuk, mekanisme, dan

dampak peran manajemen Komite Madrasah dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan, khususnya fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh teori partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan stakeholder eksternal untuk membangun tata kelola pendidikan yang demokratis dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana peran manajemen Komite Madrasah dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, khususnya di dua madrasah yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi madrasah lain dalam mengelola hubungan kemitraan dengan Komite Madrasah secara lebih efektif.

Naskah menggunakan bahasa Indonesia. Naskah diketik dengan menggunakan huruf Arial (Microsoft Word) dengan ukuran 12 point pada kertas ukuran A4, dengan spasi 1,5, kemudian teks dibagi menjadi dua kolom, dengan batas kertas yaitu sebagai berikut : batas kiri dan atas 30 mm, batas kanan dan bawah 25 mm.

Pada bagian ini jelaskanlah bagian dasar dari artikel yang ditulis, yang mencakup uraian singkat tentang latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang didalamnya mencakup mendeskripsikan fenomena permasalahan yang diamati, kondisi nyata yang diperoleh yang dapat ditunjang dengan beberapa teori. Bagian selanjutnya dapat dipaparkan data-data ataupun fakta-fakta yang mendukung penelitian maupun gagasan pemikiran. Kemudian dapat dipaparkan fokus permasalahan dan tujuan dilakukannya penelitian.

Bagian-bagian yang dimaksud di atas tidak harus diuraikan dalam bentuk poin-poin terpisah. Ketajaman bagian ini merupakan pondasi bagi reviewer untuk menilai naskah yang dikirim.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami makna, proses, dan peran yang dijalankan oleh Komite Madrasah dalam konteks yang alami dan holistik. Penelitian ini tidak berupaya menguji hipotesis, melainkan menggali secara mendalam fenomena sosial dan manajerial yang terjadi di madrasah terkait upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui keterlibatan komite.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi Analisis dilakukan secara simultan sejak awal proses pengumpulan data hingga akhir untuk memastikan dinamika lapangan tergambarkan dengan utuh.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penerapan komite madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan.**

Komite sekolah adalah organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di daerahnya. (Seriyanti et al., 2021) Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan. (Faqih & Mulianti, 2016)

Keberadaan komite sekolah didasari pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Sebab itu, pembentukan komite sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian peran dan fungsi sesuai posisi dan otonomi yang ada. (WIYANTO & Rohmadi, 2022) Komite Sekolah/Madrasah, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan". Indikator kinerja komite sekolah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbangan (advisory agency),

pendukung (supporting agency), pengawas (controlling agency), dan badan mediator (mediator agency). Peran tersebut tercakup didalamnya pelaksanaan manajemen komite sekolah.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54 menyebutkan bahwa: Ayat (1) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.(Megiati, 2016) Untuk meningkatkan peran serta dan peningkatan mutu layanan dalam bidang pendidikan, diperlukan upaya yang dapat mengakomodir pandangan aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk melaksanakan pendidikan yang lebih baik dengan berpegang pada asas demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas melalui keberadaan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan (sekolah).(Muktamar et al., 2023)

Selanjutnya pada pasal 56 ayat 3 UU Sisdiknas menyatakan bahwa: komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.(Saleh & Boko, 2022)

Berdasarkan temuan wawancara maupun observasi bahwa komite sekolah di MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan di bentuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat, yang terdiri dari ketua komite, sekretaris komite, bendahara komite, dan tiga orang anggota komite. Pembentukan komite sekolah di MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh komponen sekolah seperti yayasan, majelis guru, dan wali murid. Musyawarah dilakukan dengan cara terbuka dan transparan berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku. Struktur komite sekolah, terdiri dari ketua komite, sekretaris komite, bendahara komite, dan anggota komite yang setiap jabatannya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Peran komite sekolah adalah untuk membantu sekolah dalam menyelesaikan problem-problem yang di hadapi oleh sekolah, seperti masalah ketersediaan sarana prasarana sekolah Sumber daya manusia sekolah dan sumber pembiayaan sekolah.(Suhartono, 2020) Untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan disekolah diperlukan sarana prasarana yang memadai, karena sarana prasarana adalah faktor utama dari terlaksananya proses pelaksanaan pendidikan disekolah. Seperti ruang kelas, laptop dan fasilitas lainnya.(Sianturi et al., 2024)

Komite sekolah juga melakukan identifikasi kebutuhan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan salah satunya dengan audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan untuk mengetahui problem sekolah dan peluang yang bisa dimanfaatkan, kemudian audit eksternal dilakukan dengan menganalisis kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan sekolah.. Baik dalam bentuk masukan saran, ataupun kritik.(Sriwahyuni et al., 2019) Kemudian juga memberikan masukan terkait pengelolaan pendidikan sekolah, pembelajaran, sarana prasarana serta anggaran

yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Namun keterbatasan pendanaan menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan program kerja tersebut.(Khikmah, 2020)

Selanjutnya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan komite mendorong sekolah untuk melaksanakan semacam kegiatan pelatihan dan bimbingan terkait peningkatan dan pengembangan SDM yang ada di madrasah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.(Noprika et al., 2020) Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru sangat di perlukan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah.(Ulandari & Santaria, 2020) Artinya, peningkatan layanan pendidikan di lakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara penambahan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarasan sekolah seperti ruang kelas, laptop, kemudian memberikan bimbingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kegiatan pelayanan tidak saja pada sarana prasarana



sekolah, tetapi juga kepada SDM guru. Bagaimana pelayanan bisa maksimal jika SDM gurunya tidak mendukung. Oleh sebab itu, bimbingan dan pelatihan diperlukan dalam meningkatkan kompetensi-guru.

## **2. Keterlibatan Komite Madrasah Sebagai Penyeimbang Dalam Pengambilan Keputusan**

Peran Komite MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan dalam Memberikan Saran, Pertimbangan dan Rekomendasi, peran komite madrasah cukup baik dalam hal melaksanakan rapat-rapat, baik rapat komite dengan madrasah, maupun rapat komite dengan orang tua siswa untuk pengembangan madrasah, sistem pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dimusyawarakan oleh komite madrasah ke pihak sekolah maupun orang tua siswa. (Asnawan, 2019)

Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite MI Ma'arif 1 Bumi Mulya sebagai sarana komunikasi antara madrasah dengan orang tua siswa. (Mughtar et al., 2023) Sebagaimana komite madrasah

berhasil menjalankan tugasnya yang diterapkan oleh madrasah. Komite MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan juga sebagai pendukung penyelenggaraan yang dilakukan oleh madrasah, sebagai tempat penyampaian rekomendasi dari orang tua siswa untuk madrasah.

Tujuan komite madrasah adalah untuk pengembangan madrasah, untuk memajukan madrasah, dan membantu madrasah dalam menyelesaikan masalah. Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan, diharapkan memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi terhadap pihak lembaga pendidikan terkait semua kebijakan dan program-program sekolahnya. Sebagai peran pendukung, komite madrasah juga dapat mendorong wali murid untuk ikut andil dalam pendidikan. Sebagai pendukung pula, bentuk peran komite madrasah dapat diwujudkan dengan menggalang donasi dari banyak pihak yang bertujuan untuk biaya operasional pendidikan. (Bisri, 2020)

Berdasarkan paparan deskripsi data di atas, maka diperoleh temuan penelitian sebagai berikut : Partisipasi Komite Madrasah Sebagai Badan Pertimbangan dalam pengambilan

keputusan meningkatkan Mutu layanan Pendidikan di MI Ma'Arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan.

- a. Memberikan pertimbangan terhadap sarana prasarana. Memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah. Pembaharuan sarpras tidak hanya penambahan gedung tapi juga penambahan buku bacaan baru peserta didik yang selalu dilakukan setiap tahun oleh pihak madrasah.
- b. Memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. Berkaitan dengan pengelolaan madrasah yang telah berjalan selama ini, komite madrasah melimpahkan kepada madrasah. Komite madrasah memberikan kewenangan yang lebih

luas kepada kepala madrasah untuk mengelola madrasah dan bebas menentukan sistem pengelolaan yang sesuai dengan sumber daya manusia.

- c. Memberikan pertimbangan terhadap kompetensi peserta didik. memberikan penguasaan ketrampilan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Komite madrasah memberikan pertimbangan apa saja ketersediaan ekstrakurikuler begitupun penyediaan jam ekstrakurikuler yang ada bermacam-macam dan juga termasuk pendidikan karakter melalui pembiasaan sehari-hari yang mampu meningkatkan kompetensi peserta didik.

### **3. faktor pendukung dan penghambat manajemen komite madrasah Dalam**

**Meningkatkan Mutu  
Pelayanan Pendidikan.**

Komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memosisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. (Nomor, 25 C.E.)

Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. (Suparlan, 2022) Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. (Somali et al., 2021)

Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (Community-based manajemen berbasis sekolah (school-based management). participation) dan

Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. (Sulistiyorini, 2024)

Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan melalui pembayaran pajak, sehingga sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat. (Rahayu & Trisnawati, 2022) Komite sekolah hendaknya merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. interaksi antara masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah. (Safitri, 2021)

Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah

maupun jalur pendidikan luar sekolah. Disamping itu, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. (Sayuti, 2022)

Berdasarkan temuan penelitian baik yang didapat dari hasil observasi, dokumentasi maupun Wawancara diantaranya terdapat factor pendukung :

- a. Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mutu layanan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting. Dikarenakan pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan berakitan sebagai pemberi pertimbangan dapat dilakukan melalui program kerja bersama atau melakukan musyawarah bersama yang telah dijadwalkan oleh pihak sekolah guna membahas program kerja sekolah kedepannya.

- b. Komite sebagai Supporting agency

(pendukung kegiatan layanan pendidikan) Peran komite sekolah sebagai pendukung layanan kegiatan pendidikan dimaksudkan untuk mendukung sepenuhnya program sekolah yang nantinya akan berdampak pada output lulusan siswa yang sesuai dengan harapan visi misi sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah terkait dengan mendukung layanan pendidikan dapat dilakukan dengan cara memberikan sumbangsih pemikiran dan turut andil dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan memberikan dukunga terhadap setiap kegiatan yang bernilai positif.

c. Komite sekolah sebagai Controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan). Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan sebagai pengontrol layanan pendidikan ialah turut serta dalam kegiatan dan turut serta dalam mengawasi emajuan dan program kerja yang dibuat oleh sekoah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah terkait dengan pengontrol kegiatan layanan pendidikan dapat dilakukan dengan cara memberikan pengawasan kerja sekolah, turut serta mengecek keuangan sekolah dan memberikan pengawasan terhadap

sarana dan prasarana sekolah.

- d. Komite sekolah sebagai Mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah)
- Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas peningkatan mutu layanan pendidikan yang dilakukan komite sekolah terkait dengan penghubung atau pengait tali komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara menyampaikan aspirasi-aspirasi wali murid, menyampaikan keluhan-keluhan wali murid dan menyampaikan saran-saran yang disampaikan wali murid kepada pihak sekolah.

Selain faktor pendukung terdapat faktor penghambat di ketahui bahwa, yang menjadi kendala dalam peningkatan mutu layanan pendidikan

di MI Ma'arif 1 Bumi Mulya dan MIN 1 Way Kanan adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana sekolah, keterbatasan SDM guru, dan kesibukan komite sekolah. (Kasroni et al., 2025)

### **E. Kesimpulan**

Dari keseluruhan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen komite madrasah memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan apabila didukung oleh sinergi yang kuat antara pihak madrasah, komite, dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan peran-peran komite sangat bergantung pada koordinasi yang intensif, kejelasan pembagian peran, serta ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komite melalui pelatihan dan pemberdayaan menjadi langkah strategis yang dapat diambil untuk memaksimalkan perannya secara optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, S. (2022). Peran Komite Sekolah Sebagai Perantara Antara Lembaga Pendidikan Dan Masyarakat Desa Di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 138–162.

Asnawan, A. (2019). Integrasi Pola Kerjasama Komite Madrasah Dan Kepala Madrasah Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2), 108–119.

Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah Dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51–64.

Faqih, M., & Mulianti, E. (2016). Peran Komite Sekolah Dengan Mutu Pendidikan. *Jurnal Visionary*, 2(2), 108–113.

Hikmawati, S. I. (2024). Peran Dan Fungsi Komite Madrasah Dalam Membangun Budaya Mutu Di Man 2 Banyuwangi. *Proceedings Of International Conference On Educational Management*, 2, 505–525.

Kasroni, I., Susanto, D., & Rasuna, R. (2025). Manajemen Komite Sekolah Dalam Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan Di Min 1 Barito Timur Tahun 2024. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 186–194.

Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *Jamp: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123–130.

Megiati, Y. E. (2016). Pemberdayaan Komite Sekolah: Kajian Konsep Dan Implementasinya. *Sap (Susunan Artikel Pendidikan)*, 1(2).

Muchtar, M. I., Mujahidah, M., Arifin, F. R., Abdullah, M., Yasin, M., Kemala, R., Ferdinan, F., & Amirah, A. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam: Teori Dan Panduan Komprehensif*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muktamar, A., Iswahyudi, M. S., Salong, A., Wote, A. Y. V., Rahmatiyah, R., Riyadi, S.,

Kusumawati, M., Rohaeti, L., & Leuwol, F. S. (2023). *Manajemen Pendidikan: Konsep, Tantangan, Dan Strategi Di Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nomor, U.-U. (25 C.E.). Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). *Peraturan Pemerintah (Pp) No*, 65.

Noprika, M., Yusro, N., & Sagiman, S. (2020). Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 224–243.

Rahayu, P., & Trisnawati, N. (2022). Strategi Humas Di Smk Ipiems Surabaya Dalam Meningkatkan Citra Dan Kepercayaan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (Jpap)*, 10(2), 124–139.

Ramadana, S. (2021). *Manajemen Layanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Mi Nw Tanak Beak Narmada*. Uin Mataram.

Rismawati, R., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Peran Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Tahsinia*, 5(7), 1099–1122.

Safitri, A. (2021). *Manajemen Kepala Sekolah*. Cv. Scientific Corner Publishing.

Saleh, S., & Boko, Y. A. (2022). Peran Dewan Pendidikan Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di Ternate. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 61–66.

Sayuti, A. (2022). Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Mubtadiin*, 8(01).

Seriyanti, N., Ahmad, S., & Destiniar, D. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. *Jmksp (Jurnal Manajemen*,

*Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*), 6(1), 15–33.

Sianturi, H. R., Se, M., Sutisna, A., Dalia, A., Kurniawan, A. C., Dewi, A. V., Mardiana, C., Danial, D. S. R., Taopik, D., & Darlianti, E. (2024). *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik*. Edu Publisher.

Somali, S. G., Parsono, S., & Yudhokusuma, D. (2021). Peranan Komite Sekolah Dalam Mendukung Proses Kegiatan Belajar Mengajar Di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 3(2), 143–148.

Sriwahyuni, E., Kristiawan, M., & Wachidi, W. (2019). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (Snp) Pada Smk Negeri 2 Bukittinggi. *Jmksp (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 21–33.

Suhartono, S. (2020). Humas Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah. *Paedagogie: Media Kependidikan, Keilmuan Dan Keagamaan*, 8(1), 45–56.

Sulistiyorini, M. A. (2024). *Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan Islam Dengan Masyarakat Di Madrasah Tsanawiyah Unggulan*. Garudhawaca.

Suparlan, M. (2022). *Manajemen Berbasis Sekolah: Dari Teori Sampai Dengan Praktik*. Bumi Aksara.

Suryadi, R. A., & Mushlih, A. (2019). *Desain Dan Perencanaan Pembelajaran*. Deepublish.

Ulandari, W., & Santaria, R. (2020). Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Melalui Pendidikan Dan Pelatihan. *Kelola: Journal Of Islamic Education Management*, 5(1), 57–68.

Wiyanto, J., & Rohmadi, Y. (2022). *Manajemen Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Di Sekolah*

*Dasar Muhammadiyah Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022*. Uin Raden Mas Said Surakarta.